

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETENTUAN SANKSI DENDA  
DALAM REGULASI PERIKANAN INDONESIA  
(STUDI NORMATIF UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS  
PENEGAKAN HUKUM)**

**Farhan Furqani  
NPM: 213309042018**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan sanksi denda dalam regulasi perikanan Indonesia terhadap tindak pidana perikanan. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan sanksi denda yang diatur dalam mencegah dan menangani tindak pidana perikanan. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor dan solusi yang mempengaruhi penerapan sanksi denda yang diatur dalam mencegah dan menangani tindak pidana perikanan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketentuan sanksi denda dalam regulasi perikanan Indonesia terhadap tindak pidana perikanan merupakan langkah penting dan strategis dalam upaya pemerintah untuk mengendalikan serta mencegah praktik perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Sanksi denda yang ditetapkan dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku telah dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan perikanan di wilayah perairan Indonesia dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Efektivitas penerapan sanksi denda dalam mencegah dan menangani tindak pidana perikanan di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi. Sementara sanksi denda dimaksudkan sebagai alat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perikanan, beberapa faktor seperti besaran denda yang tidak selalu memadai untuk mengimbangi keuntungan dari aktivitas ilegal, kesulitan dalam penegakan hukum, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pelestarian sumber daya perikanan mempengaruhi efektivitasnya. Untuk mencegah dan menangani tindak pidana perikanan, sanksi denda tidak cukup besar, penegakan hukum sulit, dan kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang pentingnya pelestarian sumber daya kelautan. Sanksi denda tidak efektif karena beberapa alasan. Salah satunya adalah jumlah denda yang tidak sebanding dengan keuntungan dari kegiatan perikanan ilegal. Faktor lain termasuk masalah logistik dan ketersediaan sumber daya penegakan hukum, dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang regulasi perikanan dan konsekuensi dari kegiatan ilegal. Mengubah besaran denda, meningkatkan kekuatan penegakan hukum, dan meningkatkan pendidikan dan kampanye kesadaran adalah solusi yang kompleks dan terpadu.

Untuk itu disarankan kepada pemerintah Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas sanksi denda, Pemerintah harus mempertimbangkan penyesuaian besaran denda berdasarkan evaluasi berkala, disarankan agar pemerintah Indonesia melakukan penyesuaian dan evaluasi berkala terhadap besaran denda, memastikan denda tersebut cukup berat untuk menghilangkan insentif ekonomi dari kegiatan perikanan ilegal.

*Kata Kunci: Sanksi Denda, Regulasi Perikanan, Efektivitas Penegakan Hukum*